



IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH BIDANG INDUSTRI PANGAN DI KABUPATEN SUMEDANG 2024

Silvi Syahrani Mardiana, Shalma Shalshabilla,

Azril Alfian Finanda, Iyep Saefulrahman

Prodi atau Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Padjadjaran

Abstrak

Sistem pemerintahan Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah berhubungan dengan adanya kewenangan daerah, dimana daerah otonom mendapat kewenangan untuk menjalankan dan mengurus urusan daerah sesuai dengan kebutuhan. Salah satu urusan daerah yang penting adalah di bidang perindustrian. Industri dapat membantu perekonomian lokal sebagai wujud dari kemandirian daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah sendiri. Satu di antara daerah yang terkenal akan perindustriannya adalah Kabupaten Sumedang dengan industri pangan tahu Sumedangnya. Permasalahan yang terjadi adalah alat produksi yang digunakan masih tradisional, dimana menghambat pengembangan kualitas hasil produksi industri ini. Tentunya, dibutuhkan adanya keterlibatan pemerintah daerah dalam mengembangkan industri ini yang perlu diketahui. Penelitian ini bertujuan untuk memahami cara pelaksanaan otonomi daerah di salah satu bidang perindustrian yaitu industri pangan. Metode dalam riset ini adalah kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil Riset menunjukkan bahwa tidak adanya kebijakan khusus dan upaya yang dilakukan oleh Dinas terkait bagi perindustrian pangan tahu Sumedang akibat keterbatasan anggaran. Sedangkan, pemilik industri merasa tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dalam pengembangan industrinya.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Perindustrian, Tahu Sumedang.

PENDAHULUAN

Sektor industri memiliki peran penting demi mendukung perkembangan ekonomi suatu negara, karena kemajuan di sektor ini dapat membantu menciptakan kestabilan ekonomi. Salah satu faktor utama yang memengaruhi perkembangan industri adalah globalisasi. Dalam konteks globalisasi, terdapat tiga aspek utama yang berpengaruh, yaitu ideologi, teknologi, dan pasar. Ideologi berkaitan dengan cara pandang atau prinsip yang memengaruhi arah pengembangan industri. Teknologi mencakup penggunaan inovasi dan alat modern untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Sementara itu, pasar atau aspek ekonomi melibatkan bagaimana hasil produksi industri dipasarkan, baik di kancah nasional maupun internasional. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan mendukung pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan. Dimana aspek teknologi berkaitan erat dan penting di sektor perindustrian.

Kabupaten Sumedang adalah salah satu daerah otonom yang berada di bagian tengah Provinsi Jawa Barat dan menjadi penghubung antara kota-kota serta kabupaten lain menuju ibu kota provinsi, yaitu Kota Bandung. Posisi strategis ini menjadikan Kabupaten Sumedang sebagai wilayah pendukung dalam pengembangan kawasan Bandung Raya, termasuk pengembangan industri pangan khas daerah tahu Sumedang.

Saat ini, industri tahu telah mengalami perkembangan pesat, yang terlihat dari meningkatnya jumlah produsen tahu di Kabupaten Sumedang. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian di Bidang Perindustrian Kabupaten Sumedang tahun 2023, jumlah produsen dari industri tahu di Kabupaten Sumedang adalah sebanyak 282 pengusaha. Banyaknya pengusaha tahu tersebut

membuat terbukanya peluang tenaga kerja di sekitar industri. Situasi ini menunjukkan bahwa usaha tersebut memiliki harapan yang sangat menjanjikan serta menjadi salah satu andalan masyarakat dalam mendukung perekonomian masyarakat sekitar secara khusus serta perekonomian masyarakat secara umum, karena mengandalkan teknologi sederhana dalam proses produksinya.

Berkaitan dengan teknologi sederhana, diketahui bahwa kualitas dari alat produksi akan mempengaruhi proses dan hasil dari produk itu sendiri. Maka, alat produksi merupakan bagian penting dalam industri. Alat produksi berhubungan langsung dengan hasil produksi, karena barang yang dihasilkan akan sangat tergantung pada alat yang digunakan. Semakin bagus alat produksinya, maka kemungkinan besar hasil produksi akan berkualitas baik (Maulida & Tholibin, 2021:3). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahendra & Alansyah (2019), bahwa teknologi yang digunakan dalam proses produksi tahu Sumedang masih dilakukan dengan peralatan yang sederhana. Alat yang digunakan merupakan alat yang mudah dijumpai dan diperoleh di daerah sekitar. Ditambah lagi, berdasarkan penelitian pada salah satu industri tahu Sumedang yang dilakukan oleh Maryanto, dkk. (2022), bahwa proses produksi dari usaha tahu Sumedang masih tradisional yang terlihat dari alat penggiling kedelai yang digunakan terbuat dari rakitan dengan menggunakan galon air sebagai wadahnya. Begitu pula dengan alat pengering tahu yang hanya menggunakan penyaring biasa. Dengan demikian, alat produksi yang memiliki kualitas baik perlu digunakan dalam industri agar menghasilkan produk berkualitas.

Bila melihat peluang dari industri tahu Sumedang ini, terlihat

bahwa potensi perkembangan dari industri ini dapat membawa tahu Sumedang menjadi produk lokal yang mendunia. Hal ini pun direncanakan oleh Pj Bupati Kabupaten Sumedang bahwa produk lokal Kab. Sumedang berpotensi melakukan ekspor ke negara lain, didasarkan pada kesiapan industri untuk menjamin kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk. Lagi-lagi, alat produksi menjadi hal penting untuk menjamin ketiga hal tersebut. Dari Kementerian Perindustrian sendiri telah mengeluarkan program *One Village One Product* (OVOP), dimana program ini bertujuan mengembangkan potensi daerah di suatu wilayah yang menjadikan produk tersebut sebagai produk yang khas dari daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan IKM di Sentra IKM melalui OVOP, pengembangan industri khas daerah diharapkan dapat membangun potensi ekonomi dari kekayaan daerah, mengembangkan motivasi untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mendukung industri khas daerah yang bercirikan kearifan lokal sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa industri pangan tahu Sumedang masih mengalami tantangan dalam aspek alat produksi yang tentu akan mempengaruhi kualitas dari hasil produksi tahu Sumedang itu sendiri. Mengingat besarnya pasar dari industri ini, tentu permintaan pun akan semakin besar, yang bilamana proses produksi tidak dilakukan dengan cepat akan menurunkan keuntungan dari industri ini. Pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, dalam hal ini adalah pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian bidang perindustrian perlu mendukung pengembangan

industri ini sesuai dengan amanat Kementerian Perindustrian Indonesia. Dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah memberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan dengan kebutuhan daerah. Maka, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang didasarkan dari peraturan perundang-undangan dan mengurus urusannya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerahnya, dalam konteks ini adalah kebutuhan pengembangan industri tahu Sumedang sebagai ciri khas daerah. Selanjutnya, berdasarkan permasalahan tersebut, maka kami mengkaji terkait kebijakan dan upaya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian bidang perindustrian terhadap permasalahan tersebut sebagai implementasi dari otonomi daerah di bidang industri pangan tahu Sumedang.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumedang dan di industri tahu Sumedang sekitar Kabupaten Sumedang pada bulan November 2024. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian dilakukan untuk mengetahui dan memberikan deskripsi terkait implementasi otonomi daerah Kabupaten Sumedang di bidang industri pangan tahu Sumedang. Perolehan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu cara yang sering dipakai dalam mengumpulkan data riset kualitatif. Wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan macam-macam data dari responden dalam berbagai situasi dan konteks (Saroso (2017:47) dalam Yusra (2021:18)). Wawancara dilakukan

dengan Kepala Bidang Perindustrian dan Staf Pelaksana DISKOP, UKM, PP Kabupaten Sumedang, serta pemilik industri tahu Sumedang.

Selanjutnya, Observasi/pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung subjek riset dengan tujuan tertentu. Observasi digunakan untuk menghimpun data riset berdasarkan pada pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2007:118). Pengamatan dalam riset ini adalah dengan mengamati bidang perindustrian DISKOP UKM PP Kab. Sumedang dan pemilik industri tahu Sumedang secara langsung.

Dokumentasi merupakan cara yang dipakai untuk mendapatkan data dan informasi yang berbentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung riset. Studi dokumen adalah pelengkap dari observasi dan wawancara agar dapat dipercaya atau memiliki kredibilitas tinggi bila didukung oleh foto-foto dan karya tulis akademik yang sudah ada (Sugiyono 2018:476). Dalam riset ini, data dikumpulkan dengan cara membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait topik permasalahan, yaitu literatur tentang implementasi otonomi daerah di Kabupaten Sumedang dalam bidang urusan perindustrian. Terdapat penelitian sebelumnya yang menjelaskan permasalahan alat produksi yang masih menggunakan alat tradisional yaitu dalam Maryanto (2022:1855) dan Mahendra & Alansyah (2019), bahwa teknologi yang digunakan dalam proses produksi tahu Sumedang masih dilakukan dengan peralatan yang sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan. Hal ini bertujuan mewujudkan cita-cita keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat. Implementasi otonomi daerah telah mengubah cara pandang dalam pembangunan daerah, dari yang sebelumnya terpusat pada pemerintah pusat atau disebut juga sentralisasi menjadi desentralisasi, di mana kewenangan dan tanggung jawab diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai daerah otonom. Kewenangan otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengeksplorasi serta mengoptimalkan potensi dari industri pangan sebagai upaya menambah sumber pendapatan daerah dan membangun kekuatan ekonomi secara mandiri tanpa bergantung pada dukungan atau bantuan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki peluang strategis dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri, khususnya industri pangan. Dengan memanfaatkan prinsip desentralisasi, Kabupaten Sumedang dapat mengeksplorasi potensi lokalnya, seperti pengembangan produk pangan berbasis sumber daya unggulan daerah, termasuk industri tahu Sumedang. Langkah ini sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk merancang kebijakan berbasis kebutuhan lokal guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Industri tahu Sumedang telah berhasil dikenal di berbagai daerah

sebagai ciri khas lokal dari Sumedang. Kepopulerannya sebagai produk khas daerah membuat tahu Sumedang memiliki jaringan pemasaran yang semakin meluas, dengan banyaknya *outlet*, warung, dan pusat penjualan yang tersebar di berbagai kota. Industri ini termasuk dalam Industri Kecil Menengah (IKM) yang membutuhkan peran dari pemerintah daerah dalam pengembangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Namun, dibalik itu, terdapat hambatan dalam produksi industri ini yaitu alat produksi yang tradisional dan sederhana membuat industri ini sulit berkembang karena kualitasnya yang tidak menunjukkan adanya kenaikan. Tentunya, alat produksi sangat bergantung terhadap hasil produksi karena semakin bagus alatnya maka hasilnya akan semakin bagus pula. Hal ini dirasakan sendiri oleh salah satu pemilik industri tahu Sumedang di Kabupaten Sumedang. Industri tahu Sumedang tidak bisa berkembang lebih jauh, dalam hal ini dari segi kualitas, dimana para pelaku industri tidak bisa meningkatkan kualitas hasil produksi akibat alat produksi yang masih tradisional.

Padahal, kualitas hasil produksi akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri tahu Sumedang, yang mungkin dapat memiliki kesempatan mengeksport tahu Sumedang ke negara lain. Ekspor tahu Sumedang ini pun telah diutarakan oleh Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Sumedang, Herman Suryatman, pada saat acara *Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2023* di Barcelona. Menurut beliau, Kabupaten Sumedang memiliki potensi besar untuk melakukan ekspor berbagai produk khas daerah, salah satunya adalah tahu Sumedang. Lebih lanjut lagi, beliau menyampaikan bahwa kunci dari dilaksanakannya potensi ini adalah pada kesiapan dan profesionalitas pemilik industri dan usaha tahu Sumedang. Mulai

dari kesiapan untuk menjamin kualitas produk, kuantitas produk, sampai dengan kontinuitas produk. Hal ini tentunya diperlukan kebijakan yang inklusif dari pemerintah daerah dalam mengeluarkan program untuk membantu perkembangan industri pangan tahu Sumedang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segi perekonomian. Dengan demikian, terlihat bahwa alat produksi menjadi aspek penting dalam mengembangkan industri tahu Sumedang menjadi lebih maju lagi bahkan ke mancanegara.

Bidang Perindustrian dalam Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian berperan penting dalam menjalankan sebagian tugas pemerintahan daerah dalam sektor perindustrian. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2024, bidang ini bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, melakukan evaluasi, serta menyusun laporan terkait pengelolaan sektor perindustrian di Kabupaten Sumedang. Sebagai bagian dari struktur dinas yang memiliki fungsi strategis, Bidang Perindustrian bertanggung jawab dalam mendukung pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah (IKM) melalui penyusunan kebijakan yang relevan, pelaksanaan program pembinaan, dan pengembangan potensi lokal. Selain itu, bidang ini juga memiliki kewenangan untuk memastikan pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan sektor perindustrian berjalan dengan baik, mulai dari pengelolaan data pelaku usaha hingga pengurusan izin dan regulasi. Maka dari itu, bidang perindustrian perlu mendampingi industri tahu Sumedang agar dapat berkembang lebih jauh lagi. Ditambah lagi, berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengembangan IKM di Sentra IKM melalui *One Village One Product (OVOP)*, pengembangan industri khas

daerah perlu dilakukan agar dapat membangun potensi ekonomi dari kekayaan daerah dan mengembangkan motivasi untuk menghasilkan produk bernilai tinggi. Dengan demikian, peran bidang perindustrian dari Dinas Koperasi UKM PP Kab. Sumedang dibutuhkan dalam pengembangan industri tahu Sumedang ini.

Kebijakan yang Dikeluarkan

Kebijakan yang dikeluarkan berkaitan dengan industri, didasarkan pada aturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043. Dimana, Regulasi ini memberikan kerangka kerja bagi pengembangan sektor perindustrian di Sumedang. Peraturan ini mencakup rencana strategis pembangunan industri berbasis lokal, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi kebijakan industri.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dengan Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, ditemukan bahwa sampai detik ini tidak ada kebijakan yang jelas dan terstruktur yang dikeluarkan untuk mendukung pengembangan industri pangan tahu Sumedang. Kepala Bidang Perindustrian, Tatang Mulyana, menyatakan bahwa meskipun ada rencana dalam pengembangan industri ini, kebijakan tersebut masih dalam tahap wacana dan belum terealisasi menjadi program atau regulasi yang nyata.

Minimnya kebijakan yang mendukung berdampak pada kurangnya fasilitas pendukung yang diterima oleh pelaku industri tahu Sumedang. Keluhan utama yang disampaikan oleh para pemilik industri adalah sulitnya akses terhadap alat produksi yang lebih

modern dan efisien. Sebagian besar alat yang digunakan masih tradisional, sehingga mempengaruhi skala produksi dan kualitas produk secara keseluruhan. Pemilik industri merasa bahwa intervensi pemerintah dalam bentuk penyediaan atau subsidi alat produksi modern akan sangat membantu, namun sampai saat ini belum ada kebijakan atau program dari pemerintah daerah terkait hal tersebut.

Pemerintah daerah belum mampu mendukung secara signifikan dalam pengembangan industri pangan tahu Sumedang. Ketiadaan kebijakan yang nyata menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi yang besar dari industri ini. Industri tahu Sumedang cenderung berkembang secara mandiri dengan segala keterbatasannya, tanpa adanya fasilitasi atau dukungan regulasi yang memadai.

Faktor yang Menghambat

Tatang Mulyana, selaku Kepala Bidang Perindustrian mengungkapkan beberapa faktor yang menghambat dinas dalam penyelenggaraan industri pangan tahu Sumedang di Kab. Sumedang. Keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat utama. Pengembangan sektor industri pangan tahu Sumedang bukan menjadi prioritas utama pemerintah pusat, alokasi dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada bidang perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian tergolong relatif rendah. Ditambah lagi dengan perolehan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Sumedang pun tergolong rendah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Sumedang pada tahun 2024 sebagaimana yang disebutkan oleh data DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah 611,21 M yang dimana bila dibandingkan dengan daerah lain masih tergolong

sangat rendah, hal ini menyebabkan tugas dan fungsi bidang perindustrian di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian tidak terlaksana dengan baik.

Kemudian, Tatang Mulyana juga menyatakan bahwa sejak awal ia menjabat sebagai Kepala Bidang Perindustrian di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sumedang selama 1 (satu) tahun hingga saat ini, tidak terdapat program yang dijalankan dalam memfasilitasi atau memberikan pembinaan terhadap pengembangan industri pangan tahu Sumedang, bahkan hal seperti kearsipan pun tidak terurus dengan baik. Alasannya karena tidak memperoleh dana yang cukup dari pemerintah pusat dan ditambah dengan rendahnya PAD yang didapatkan oleh Kab. Sumedang dalam meregulasi terkait penyelenggaraan industri pangan tahu Sumedang.

Selain itu, karena adanya pandangan bahwa industri pangan tahu Sumedang sudah mampu berkembang secara mandiri karena popularitas dan *branding* dari tahu Sumedang sudah terkenal luas di kalangan masyarakat Indonesia. Namun, pandangan ini justru menimbulkan kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam memberikan dukungan lanjutan terhadap industri pangan tahu Sumedang. Karena alasan tersebut, pemerintah daerah Kab. Sumedang lebih memilih untuk memprioritaskan sektor industri lain yang dipandang membutuhkan perhatian lebih. Sebagaimana yang disebutkan oleh Tatang Mulyana, bahwa mereka lebih fokus kepada pengembangan industri kecil seperti tahu dari Desa Cibuntu, ubi Cilembu hingga industri tembakau yang memiliki skala yang lebih besar. Meskipun, pada realisasinya juga terhambat karena kurangnya dana anggaran yang diberikan oleh pusat dan PAD yang Kab. Sumedang yang rendah. Hal ini

menyebabkan industri pangan tahu Sumedang yang mempunyai potensi kehilangan dukungan yang seharusnya dapat mengembangkan industri pangan tahu Sumedang sebagai ciri khas lokal daerah Sumedang bersaing secara global atau mengadakan inovasi terhadap produk.

Upaya yang dirasakan pemilik industri

Menurut salah satu pemilik usaha tahu Sumedang yang mengolah industri tahu sendiri, yaitu Bapak Halim selaku pemilik Tahu Rais Sumedang yang berlokasi di sekitar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, benar adanya bahwa dari pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian maupun dari Pemerintah Daerah tidak pernah melakukan kunjungan ke pabrik pembuatan industri tahu Sumedang. Meskipun, lokasi dari industri dekat dari Kantor Pemerintah Daerah. Pak Halim sendiri merasa bahwa industri tahu Sumedang sudah sangat stabil sehingga mungkin hal tersebut menjadi alasan mengapa pemerintah daerah tidak pernah melakukan kunjungan ke industri tahu Sumedang.

Lebih lanjut, terkait pembinaan benar adanya bahwa tidak pernah ada pembinaan yang dilakukan oleh Dinas terkait kepada pemilik industri tahu Sumedang. Pembinaan yang dapat dilakukan bukan hanya dalam bentuk pelatihan teknik mengenai cara produksi yang lebih efisien tetapi juga dalam hal pengelolaan industri yang berguna untuk meningkatkan kualitas produk. Pelaku industri merasa bahwa hal tersebut penting untuk mengembangkan industri tahu Sumedang. Meskipun, memang tahu Sumedang sudah memiliki nama besar dan jaringan pasar yang luas, pembinaan dari pemerintah daerah akan membantu meningkatkan perkembangan dari industri tahu Sumedang sendiri.

Beralih ke pengolahan industri tahu Sumedang sendiri, tentunya alat

pengolahan merupakan aspek penting dari berjalannya industri pangan tahu Sumedang yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini. Berdasarkan pendapat dari pemilik Tahu Rais Sumedang, alat pengolahan modern yang diperlukan dalam menjalankan industri tahu Sumedang membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Akhirnya, Pak Halim pun hanya menggunakan alat tradisional, seperti cetakan tahu yang dibuat dari kayu hasil rakitan sendiri serta mesin penggiling kedelai yang tidak terlalu besar dan memiliki sedikit kapasitas.

Dengan demikian, terlihat bahwa memang meskipun tahu Sumedang telah memiliki kemandirian dalam menjalankan industrinya, peran dari pemerintah daerah tetap diperlukan untuk membantu mengembangkan industri ini terutama memfasilitasi alat yang lebih modern. Hal ini akan membantu perkembangan industri tahu Sumedang sebagai ciri khas daerah, sesuai dengan program *One Village One Product (OVOP)* yang akan membangun potensi ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Industri pangan tahu Sumedang memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai produk lokal unggulan yang mampu bersaing hingga tingkat internasional. Namun, sektor industri ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait penggunaan alat produksi tradisional yang berdampak pada kualitas dan efisiensi produksi. Pemerintah daerah, khususnya melalui Bidang Perindustrian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, belum memberikan dukungan yang memadai dalam bentuk kebijakan maupun bantuan langsung yang diperlukan untuk mendorong modernisasi alat produksi.

Faktor seperti keterbatasan anggaran, prioritas terhadap sektor lain, serta minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan industri pangan tahu Sumedang ini menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Sumedang. Tanpa adanya dukungan yang tepat, dikhawatirkan industri pangan tahu Sumedang akan terus berkembang secara mandiri dengan segala keterbatasannya, sehingga sulit untuk mencapai potensi maksimal sebagai produk unggulan khas daerah Kabupaten Sumedang.

Saran

Dalam meningkatkan pengembangan industri pangan tahu Sumedang yang memiliki potensi besar sebagai ciri khas ikon lokal daerah Kab. Sumedang, diperlukan kebijakan yang terstruktur dan terarah dari pemerintah daerah, terkhusus Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kab. Sumedang. Perlu dilakukan evaluasi terhadap alokasi dana anggaran, memperkuat program fasilitasi seperti menyediakan alat-alat produksi modern, serta mendorong inovasi melalui pelatihan dan pembinaan bagi pemilik industri sekaligus pelaku usaha. Selain itu, mengadakan kunjungan rutin ke pelaku industri agar dapat mengetahui tantangan yang dihadapi. Kemudian, Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kab. Sumedang juga perlu melakukan restrukturisasi kearsipan untuk mengelola dan menata dokumen-dokumen arsip yang tercatat.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Indonesia. Kabupaten Sumedang. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2043.

Indonesia. Kabupaten Sumedang. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Bungin. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. DISKOP UKMPP Sumedang. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Sumedang. https://diskopukmpp.sumedangkab.go.id/profil_e/visimisi

DJPk Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang 2024*. DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=11&tahun=2024&provinsi=10&pemda=15>.

Fiantika, F. R. & dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Haloho, P, Purnamasari, H, Aryani, L, (2022). Strategi pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(4). <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3766/2991>

Ihsan, M. N. (2014). *Implementasi Data Envelopment Analysis (Dea) Untuk Mengukur Efisiensi Industri Tahu Di Kabupaten Sumedang*. (Skripsi Sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia). <https://repository.upi.edu/15483/>

Kementerian Perindustrian RI. Tentang OVOP *One Village One Product*. <https://ovop.kemenperin.go.id/tentang-kami/>

Kumara. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Ahmad Dahlan.

Mahendra, J., & Alansyah, A. Y. (2019). Pengembangan Sumberdaya Industri Kabupaten Sumedang (Studi Kasus Industri Tahu Sumedang). *Jurnal Tata Kota dan Daerah*. 11(2), 77-84. <https://www.academia.edu/download/107947975/243.pdf>

Maryanto, Haryono, G., Sari, A. E., Abdallah, Z., & Pramurza, D. (2022, November). Optimalisasi Produktivitas Usaha Tahu Sumedang Husin Pelayang Raya. In *Prosiding Seminar Nasional Unimus* 5. 1855. <https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/download/1152/1150>

Maulida, I. S., & Tholibin, K. (2021). Pengaruh Kualitas Alat Produksi Terhadap Volume Produksi Industri Tenun Sarung Di Lamongan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis Dan Inovasi*, 5(1), 3. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/niaga/article/view/3192>

Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara.

Putra, S., Basri, S., Pailis, E. A. (2017). Analisis Industri Pangan Sub Sektor Industri Makanan Ringan Kue Bangkit dan Bolu. *Jurnal JOM Fekon*. <https://media.neliti.com/media/publications/115615-ID-analisis-industri-pangan-sub-sektor-indu.pdf>

Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Thahir, B. (2019). Kebijakan sosial dan otonomi daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2(2), 91-102. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/497/>

Yusra, Z. (2021). Pengelolaan LKP Pada Masa Pendmik COVID-19. *Journal Lifelog Learning*, 4 (1), 15-22. <https://doi.org/10.33369/joll.4.1.15-22>